

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Instansi : Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa	(1) Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP; (2) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 391/KPTS/M/2011	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak - pihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak	Sampai diketahui pemenangnya
2	Rincian Harga Satuan Dalam Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang Sedang Digunakan Dalam Proses Lelang	Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat	Melindungi pelelangan tetap dapat dipertanggungjawabkan	Sampai dengan penetapan pemenang pengadaan
3	MOU/SPK yang Masih Dalam Proses	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi yang bisa disalahgunakan	Menjaga Objektivitas penilaian	Jika sudah terbit MOU/SPK
4	Konfigurasi Database dan Aplikasi Serta Username dan Password	Permen Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016	Mengungkap rahasia (database dan aplikasi serta username dan password kelurahan)	Melindungi database dan aplikasi serta username dan password kelurahan	Tidak terbatas
5	Sistem Pengelolaan Keuangan dan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	(1) Pasal 17 huruf e dan huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan data oleh pihak tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik	Tidak terbatas
6	Laporan Keuangan Kelurahan yang Belum Diaudit	(1) Pasal 17 huruf l UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; (2) Pasal 44 ayat 1 dan 2 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka

7	Laporan Pelaksanaan Anggaran	(1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17; (2) UU Nomor 43 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 dan 2	Dapat merugikan proses penyusunan kegiatan yang disepakati dan adanya pengungkapan secara prematur	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Sampai dinyatakan sebagai dokumen terbuka menurut UU
8	Laporan Keuangan Tahun Berjalan	(1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat 1; (2) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf j	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Adanya pengungkapan secara prematur	Sampai terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit
9	Laporan Hasil LHP	Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007	Dapat Mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan	Mengganggu penegakan hukum	Sampai dinyatakan sebagai dokumen terbuka
10	Dokumen pertanggung jawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya	(1) Pasala 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; (2) Pasal 44 ayat 1 dan 2 dan pasal 66 huruf h UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan; (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (4) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Dapat menimbulkan penilaian yang salah serta menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur dan belum bersifat final	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Tidak terbatas, dan sampai dikatakan telah diaudit dan bersifat final
11	Dokumen Notulen Rapat Berdasarkan Sifat Rapat	Data dokumen yang bersifat melanggar Pasal 17 tentang KIP dan peraturan lainnya	Dapat merugikan proses penyusunan kegiatan yang disepakati dan adanya pengungkapan secara prematur	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Sampai dinyatakan sebagai dokumen terbuka

12	Arsip Dinamis, Aktif dan Interaktif yang Berisikan : (1) Dokumen Keuangan (SPJ berikut lampirannya, dokumen anggaran dan otoritasnya); (2) Akte Otentik yang Bersifat Pribadi dan Wasiat; (3) Memorandum/Surat-Surat Penting yang Perlu Dirahasiakan	(1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17; (2) UU Nomor 43 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 dan 2	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	(1) Selama masih berlaku; (2) selama masih berlangsung; (3) selama perlindungan masih berlaku
13	Arsip Vital yang Menurut Sifatnya Rahasia, Arsip Statis yang Menurut Sifatnya Rahasia, Arsip Dinamis yang Menurut Sifatnya Rahasia	(1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I; (2) UU Kearsipan	Dapat merugikan proses penyusunan kegiatan yang disepakati dan adanya pengungkapan secara prematur	Momerandum atau surat - surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan KI atau pengadilan	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
14	Data Pribadi Penduduk (Nomor KK dan Nomor NIK)	(1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i; (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 85 ayat 1,2, dan 3	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
15	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap rahasia (data kekayaan pribadi)	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
16	Dokumen Laporan Pengaduan	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Menurunkan kredibilitas dari kelurahan dalam pelayanan	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik	Sampai dengan hasil penyelesaian dari laporan pengaduan

17	Dokumen Kasus Sengketa Hukum Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a	Mengganggu proses - proses penyidikan dan penyelidikan	Dapat mengganggu penegakan hukum	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (Kejaksaan)
18	Data Buku Register Ahli Waris	(1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h ayat 3 tentang mengungkap rahasia pribadi kondisi aset; (2) UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, atau Ketentuan Lain yang Menyangkut Sifat Penelitiannya	Dapat disalahgunakan oleh pihak - pihak tertentu	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
19	Dokumen dan Berita Acara Pembinaan Aparatur		Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan	Melindungi hak dasar pegawai/seseorang berdasarkan konstitusi	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
20	Evaluasi Organisasi dan Tata Kerja	(1) UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi ; (2) Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan PermenPAN Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Dokumen yang dapat menimbulkan analisa penilaian akuntabilitas kinerja yang salah dan menghambat langkah antisipatif dari pemecahan masalah	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
21	Dokumen Usulan Promosi, Mutasi dan Rotasi Pegawai		Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan		
22	Biodata Elektronik dan Non Elektronik PNS (Database)	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

23	Daftar Penilaian Prestasi Kerja/DP3 SKP PNS	(1) Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; (2) UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian.	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku atau atas persetujuan PNS yang
24	Identitas PNS yang Melanggar Disiplin dan Dalam Proses Dijatuhi Hukuman : (1) Proses Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Keberatan atau Hukuman Disiplin PNS, dan Peninjauan Kembali atas Hukuman Disiplin PNS; (2) Proses Pemberhentian Sementara karena Dilakukan Penahanan Pihak yang Berwajib	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap rahasia pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai diterbitkan Surat Keputusan
25	Data Piutang, Gaji dan Tunjangan	(1) Pasal 17 huruf C UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; (2) Pasal 84 ayat 1 dan 2; (3) Pasal 86 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Dapat mengungkap informasi pribadi	Melindungi hak dasar pegawai/seseorang berdasarkan konstitusi	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
26	SK Pensiun	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan	Produk tersebut hanya terbuka bagi PNS yang bersangkutan dan instansi pengusul	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan

27	Karis, Karsu, Karpeg	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan	Produk tersebut hanya terbuka bagi PNS yang bersangkutan dan instansi pengusul	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
28	Dokumen Ijin Perkawinan dan Perceraian	(1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h ayat 3 tentang mengungkap rahasia pribadi kondisi aset; (2) UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, atau Ketentuan Lain yang Menyangkut Sifat Penelitiannya	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Melindungi hak dasar pegawai/seseorang berdasarkan konstitusi	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan


 Samarinda, 26 Juni 2023
 Lurah Karang Asam Ilir
 Suwardi, S.Sos
 NIP. 196604051999031003